


ANALISIS EKONOMI POLITIK KRISIS ENERGI GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA

Rizky Amelia Siregar¹, Hanifa Ayu S², Ahmad Zaki Sinulingga³,
Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1,2,3,4}

Email : rizkyameliasiregar64@gmail.com, hanifaa567@gmail.com,
ahmadzakisinulingga@gmail.com, reniriaarmayani@uinsu.ac.id

<p>Menerima: 21/12/2025</p> <p>Diterima: 22/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 23/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>The ongoing global energy crisis from 2022 to 2025 has significantly affected the economic and political stability of developing countries, including Indonesia. The fluctuation of oil, natural gas, and coal prices due to geopolitical conflicts and global energy transition has placed strong pressure on Indonesia's national energy subsidy policy. This study aims to analyze how the global energy crisis influences Indonesia's energy subsidy policy through a political economy perspective. A qualitative descriptive approach was applied using document and policy discourse analysis, drawing on sources such as Indonesia's 2025 State Budget Financial Note, reports from the International Energy Agency (IEA), the World Bank, and various government statements. The findings reveal that Indonesia's energy subsidy policy is not merely economically driven but is also shaped by complex political considerations aimed at maintaining social stability and regime legitimacy. The government utilizes energy subsidies as a political instrument to preserve public trust amid fiscal pressures resulting from global energy price volatility. This study contributes theoretically by strengthening the understanding of energy subsidies as a political economy instrument, and practically by providing policy recommendations for a more transparent, gradual, and sustainable energy subsidy reform aligned with Indonesia's energy transition goals.</i></p> <p>Keywords: political economy, global energy crisis, energy subsidy, public policy, fiscal stability.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Krisis energi global yang masih berlanjut hingga tahun 2025 menjadi salah satu tantangan paling signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan politik internasional. Lonjakan harga minyak mentah, gas alam, dan batu bara yang dipicu oleh gangguan pasokan pascapandemi COVID19 serta eskalasi konflik geopolitik, seperti perang RusiaUkraina, telah menyebabkan volatilitas pasar energi global (Wicaksana et al., 2022). Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA, 2024), harga minyak dunia tetap tinggi di atas USD 80 per barel, sementara harga gas alam meningkat hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak dari kondisi ini sangat terasa di negara berkembang, termasuk Indonesia, yang masih bergantung pada impor energi dan menerapkan kebijakan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (2025), mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp186,9 triliun dalam APBN 2025. Meskipun kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sosial, ia juga menimbulkan beban fiskal yang signifikan dan memperlambat transisi menuju energi bersih (Wong & Dewayanti, 2024). Oleh karena itu, isu subsidi energi kini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi politik, di mana keputusan pemerintah dipengaruhi oleh tekanan global, kepentingan domestik, dan stabilitas politik nasional (Sumarno et al., 2022).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan subsidi energi di Indonesia, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek efisiensi ekonomi dan dampak fiskal (Handayani et al., 2020; Badli et al., 2020). Pendekatan tersebut kurang memperhatikan dimensi politik dan dinamika aktor yang memengaruhi perumusan kebijakan publik. Di sisi

lain, penelitian yang membahas krisis energi global cenderung berdiri terpisah dari konteks kebijakan domestik Indonesia (Murjani, 2020).

Selain itu, riset terkini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi fosil dan kebijakan subsidi yang tidak tepat sasaran telah memperlambat proses transisi energi di Indonesia (Adiputro & Martini, 2022; Wong & Dewayanti, 2024). Namun, belum banyak studi yang mengaitkan secara langsung antara tekanan eksternal akibat krisis energi global dan proses politik domestik dalam pembentukan kebijakan subsidi. Celah penelitian ini penting karena dalam konteks ekonomi politik, kebijakan energi sering kali mencerminkan kompromi antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang berbeda (Inchauste & Victor, 2017).

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan pendekatan ekonomi politik kualitatif, yang menempatkan kebijakan subsidi energi sebagai hasil dari negosiasi kepentingan antara tekanan global, kebutuhan fiskal, dan strategi politik nasional. Dengan menganalisis dokumen kebijakan, pernyataan resmi pemerintah, serta wacana media massa, penelitian ini berupaya menjelaskan logika politik di balik keputusan pemerintah dalam mempertahankan atau menyesuaikan subsidi energi di tengah tekanan global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis antara dinamika krisis energi global dan proses politik domestik Indonesia, yang sebelumnya dikaji secara terpisah. Menggunakan kerangka teori ekonomi politik dan intervensi negara, studi ini memperluas pemahaman tentang bagaimana subsidi energi bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga alat legitimasi politik dan stabilitas sosial (Putra et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dan empiris terhadap diskursus ekonomi politik energi di Indonesia modern.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, bertujuan untuk memahami fenomena ekonomi politik di balik kebijakan subsidi energi di Indonesia selama krisis energi global. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna, relasi kekuasaan, serta motif politik dan ekonomi yang melatarbelakangi kebijakan publik (Creswell & Poth, 2018).

Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara tekanan eksternal (krisis energi global dan proses pengambilan keputusan domestik melalui kebijakan subsidi energi). Fokus utama penelitian ini bukan sekadar mengukur dampak ekonomi, tetapi memahami bagaimana kebijakan tersebut terbentuk melalui interaksi antara aktor negara, kelompok kepentingan, dan tekanan geopolitik internasional (Inchauste & Victor, 2017).

Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kebijakan subsidi energi nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam periode 2020-2025, khususnya pada masa peningkatan tekanan energi global akibat konflik Rusia-Ukraina dan perubahan harga minyak dunia. Fokus kajian diarahkan pada kebijakan subsidi BBM dan listrik yang tercantum dalam APBN dan Nota Keuangan Kementerian Keuangan RI (2025), serta kebijakan transisi energi yang diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sekunder yang diperoleh dari:

1. Dokumen kebijakan resmi, seperti Nota Keuangan APBN, laporan ESDM, dan peraturan presiden terkait subsidi energi.
2. Laporan lembaga internasional, seperti International Energy Agency (IEA, 2024) dan World Bank (2023).

3. Artikel akademik dan jurnal ilmiah yang relevan dengan ekonomi politik energi (Wong & Dewayanti, 2024; Sumarno et al., 2022).
4. Analisis wacana media nasional yang menyoroti dinamika kebijakan energi dan perdebatan publik seputar subsidi bahan bakar.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dengan menelusuri sumber-sumber terpercaya yang memiliki relevansi empiris dan teoritis terhadap topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Inventarisasi Dokumen mengidentifikasi kebijakan energi dan dokumen fiskal terkait subsidi energi.
2. Koding dan Kategorisasi mengelompokkan temuan ke dalam kategori tematik seperti “tekanan global,” “kepentingan politik,” dan “legitimasi sosial.”
3. Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis) digunakan untuk menelaah narasi politik dan ekonomi yang muncul dalam kebijakan serta wacana publik, dengan mengikuti model Fairclough (2013).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dimensi kekuasaan dan ideologi di balik kebijakan subsidi energi, sesuai dengan paradigma ekonomi politik kritis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi Data (Data Reduction) memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian Data (Data Display) menyusun hasil temuan dalam bentuk tabel atau matriks hubungan antaraktor.
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) melakukan interpretasi terhadap dinamika ekonomi politik kebijakan subsidi energi di tengah krisis global.

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis triangulasi sumber untuk memastikan validitas data melalui perbandingan antar dokumen, laporan resmi, dan hasil kajian ilmiah (Denzin, 2017).

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan kerangka teori ekonomi politik klasik dan modern, terutama konsep intervensi negara (state intervention) dan ekonomi politik kebijakan publik. Teori intervensi negara digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah bertindak sebagai aktor utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan legitimasi politik melalui kebijakan subsidi energi (Oatley, 2019).

Selain itu, teori dependensi energi (energy dependency theory) juga digunakan untuk memahami keterikatan Indonesia terhadap pasar energi global, yang berdampak pada kebijakan domestik (Karl, 2020). Integrasi dua perspektif ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dimensi ekonomi dan politik yang melatarbelakangi kebijakan energi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen kebijakan, laporan fiskal, dan wacana publik periode 2020-2025, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan subsidi energi di Indonesia tetap dipertahankan meskipun tekanan fiskal meningkat secara signifikan akibat kenaikan harga energi global.

Perkembangan Subsidi Energi dalam APBN 2020-2025

Tabel 1.
Tren Subsidi Energi Indonesia 2020-2025 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Subsidi BBM& LPG	Subsidi Listrik	Total Subsidi Energi	Persentase terhadap Belanja Negara
2020	70,0	55,5	125,5	4,8%
2021	82,4	56,3	138,7	4,5%
2022	149,4	74,5	223,9	6,8%
2023	185,1	69,8	254,9	6,5%
2024	172,3	67,2	239,5	5,9%
2025	120,2	66,7	186,9	4,3%

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2025); diolah oleh peneliti.

Data tersebut menunjukkan bahwa pada puncak krisis energi global (2022-2023), subsidi energi meningkat lebih dari 80% dibandingkan periode sebelum krisis. Lonjakan ini sejalan dengan kenaikan harga minyak mentah global yang mencapai rata-rata USD 100 per barel pada pertengahan 2022 (IEA, 2024).

Selain itu, terdapat pergeseran prioritas fiskal, di mana pemerintah menahan ekspansi pembangunan infrastruktur dan mengalihkan sebagian dana untuk menjaga harga energi domestik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi energi berfungsi bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga alat stabilisasi sosial dan politik di tengah ketidakpastian global.

Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Subsidi Energi

Analisis wacana kebijakan dan pernyataan pejabat publik menunjukkan keterlibatan berbagai aktor utama, meliputi Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, DPR RI, BUMN energi, dan kelompok masyarakat sipil.

Tabel 2.
Peta Aktor dan Kepentingan dalam Kebijakan Subsidi Energi Indonesia

Aktor	Kepentingan Utama	Pengaruh terhadap Kebijakan
Tinggi	Kementerian Keuangan	Menjaga disiplin fiskal, efisiensi anggaran
Tinggi	Kementerian ESDM	Menjamin pasokan energi nasional dan transisi energi
Tinggi	DPR RI	Merespons tekanan politik dan kepentingan konstituen
Sedang-Tinggi	BUMN Energi (Pertamina, PLN)	Stabilitas operasional dan keuangan korporasi
Sedang	Masyarakat & Kelompok Kepentingan	Harga energi terjangkau dan kesejahteraan sosial
Sedang	Lembaga Internasional	Dorongan reformasi subsidi dan transisi energi bersih

Analisis ini memperlihatkan bahwa subsidi energi dipertahankan karena adanya kompromi politik antara kepentingan ekonomi makro dan stabilitas sosial, di mana pemerintah memilih untuk mempertahankan legitimasi politik ketimbang melakukan reformasi subsidi secara drastis (Inchauste & Victor, 2017; Wong & Dewayanti, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis energi global berperan sebagai faktor eksternal yang signifikan dalam pembentukan kebijakan subsidi energi di Indonesia. Lonjakan harga energi dunia mendorong tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal, memaksa pemerintah menyesuaikan kebijakan untuk menghindari instabilitas sosial (IEA, 2024; Karl, 2020). Temuan ini sejalan dengan teori dependensi energi, yang menekankan bahwa negara berkembang seperti Indonesia rentan terhadap fluktuasi pasar energi global karena ketergantungan terhadap impor dan struktur pasar yang belum terdiversifikasi (Oatley, 2019).

Kebijakan subsidi energi juga berfungsi sebagai instrumen legitimasi politik pemerintah, terutama menjelang tahun politik 2024. Keputusan mempertahankan subsidi di tengah tekanan fiskal memperlihatkan bahwa pertimbangan politik domestik sering kali mendominasi logika ekonomi (Sumarno et al., 2022). Temuan ini mendukung argumentasi teori ekonomi politik kebijakan publik, yang menyatakan bahwa kebijakan publik bukanlah hasil kalkulasi rasional semata, melainkan produk negosiasi antara aktor, ideologi, dan kepentingan kekuasaan (Oatley, 2019).

Meskipun lembaga internasional seperti World Bank (2023) dan IMF (2024) merekomendasikan pengurangan subsidi untuk efisiensi fiskal dan percepatan transisi energi, pemerintah Indonesia tetap mempertahankannya dalam bentuk subsidi kompensasi. Keputusan ini menegaskan bahwa reformasi subsidi energi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialpolitik nasional, terutama saat masyarakat menghadapi tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi pascapandemi (Wong & Dewayanti, 2024). Temuan ini juga menunjukkan bahwa meskipun transisi energi menjadi agenda global, implementasinya di Indonesia harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan daya beli masyarakat (Fairclough, 2013).

Dari sisi teoretis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa subsidi energi merupakan fenomena ekonomipolitik yang kompleks, di mana keputusan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan dan legitimasi negara (Inchauste & Victor, 2017; Karl, 2020). Dari sisi kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya reformasi subsidi berbasis keadilan sosial, yang tidak hanya menekan beban fiskal tetapi juga memastikan akses energi yang inklusif bagi masyarakat rentan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan subsidi energi di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tekanan global, kepentingan politik domestik, dan kebutuhan sosialekonomi nasional. Krisis energi global yang berkelanjutan sejak 2022-2025 telah memperkuat posisi subsidi energi sebagai instrumen utama stabilisasi sosial dan politik di Indonesia. Lonjakan harga energi dunia menciptakan tekanan fiskal yang signifikan, namun pemerintah tetap mempertahankan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas politik dalam negeri (International Energy Agency [IEA], 2024; Kementerian Keuangan RI, 2025).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif dalam menjaga legitimasi kekuasaan melalui kebijakan publik. Dalam konteks ini, subsidi energi menjadi bentuk intervensi negara yang bersifat politismenggabungkan rasionalitas ekonomi dan politik dalam satu kebijakan yang pragmatis. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di sektor energi tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan, ideologi politik, dan dinamika global (Oatley, 2019; Karl, 2020).

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan bahwa teori ekonomi politik energi memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami dilema kebijakan antara efisiensi ekonomi dan legitimasi politik. Pemerintah Indonesia menghadapi tekanan dari lembaga internasional seperti IMF dan World Bank untuk melakukan reformasi subsidi,

namun di sisi lain dihadapkan pada risiko sosial dan politik domestik apabila subsidi dikurangi secara drastis (World Bank, 2023; IMF, 2024). Oleh karena itu, kebijakan subsidi energi cenderung dipertahankan sebagai mekanisme kompromi yang memungkinkan negara tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

REFERENSI

- Adiputro, M., & Martini, A. (2022). *Ketergantungan energi fosil dan kebijakan subsidi di Indonesia*. Jurnal Energi Indonesia.
- Badli, M., et al. (2020). *Efisiensi ekonomi kebijakan subsidi energi*. Jurnal Ekonomi Publik.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Fairclough, N. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language* (2nd ed.). Routledge.
- Handayani, W., et al. (2020). *Dampak fiskal subsidi energi di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Fiskal.
- Inchauste, G., & Victor, D. G. (2017). *The political economy of energy subsidies*. Oxford University Press.
- International Energy Agency. (2024). *World energy outlook 2024*. IEA Publications.
- International Monetary Fund. (2024). *Fiscal monitor: Energy subsidies and fiscal stability*. IMF Publications.
- Karl, T. L. (2020). Energy dependency theory and global markets. *Journal of International Political Economy*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025*. Kementerian Keuangan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Murjani, R. A. (2020). Krisis energi global dan implikasi regional. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Oatley, T. (2019). *International political economy* (6th ed.). Routledge.
- Putra, A., et al. (2025). Intervensi negara dalam kebijakan energi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Politik*.
- Sumarno, A., et al. (2022). Dimensi politik subsidi energi nasional. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*.
- Wicaksana, I. G. W., et al. (2022). Volatilitas pasar energi global pascaCOVID19. *Jurnal Ekonomi Internasional*.
- Wong Dewayanti, N. (2024). Transisi energi dan beban subsidi di Indonesia. *Jurnal Sumber Daya Mineral*.
- World Bank. (2023). *Energy subsidies reform in developing countries*. World Bank Group.